

ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN ANTAR WILAYAH KECAMATAN DI KOTA DUMAI

Hendro Ekwarso, Taryono dan Isyandi

Program Studi Ekonomi Pembangunan Jurusan Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi Universitas Riau

ABSTRACT

Equitable has become a critical issue in the implementation of development to address the widening inequality, both among residents and between regions. The increasing need for data for local development planning mandates the need for indicators of inequality between regions between district within a district / city. This study aims to (i) Determine the level of welfare of population among districts in the city of Dumai, which is reflected in the GDP per capita districts, and (ii) Determine the level of inequality between regions pembangunan districts in Kota Dumai?. This research uses descriptive analysis method and index derivatives Williamson to calculate the GDP District and the level of inequality between districts in the city of Dumai.

The welfare of the Dumai city, reflected in per capita income during the period 2010 to 2014 continued to show improvement. In 2010 the average income per capita Kota Dumai Rp. 67.08 million and increased to 71.09 million in 2014. Districts with the highest level of welfare is Dumai Barat subdistrict with a per capita income in 2010 amounted to 76.12 million and increased to Rp. 93.66 million in 2014. The districts with the lowest level of welfare is Sungai Sembilan with a per capita income in 2010 amounted to Rp. 57.10 million and increased in 2014 to Rp. 58.58 million.

The degree of inequality between the districts of Kota Dumai in the low category, however, the trend is likely to increase. In 2010 the level of inequality between regions in Dumai City reflected in Williamson index of 0.1012 and amounted to 0.1002 in 2011. In the year 2012 increased to 0.1652 and continued to increase to 0.2546 in 2013. Levels inequality between regions in Dumai City in 2014 was relatively lower compared to the previous year of 0.2020.

Keywords : *income per capita, inequality*

I. PENDAHULUAN

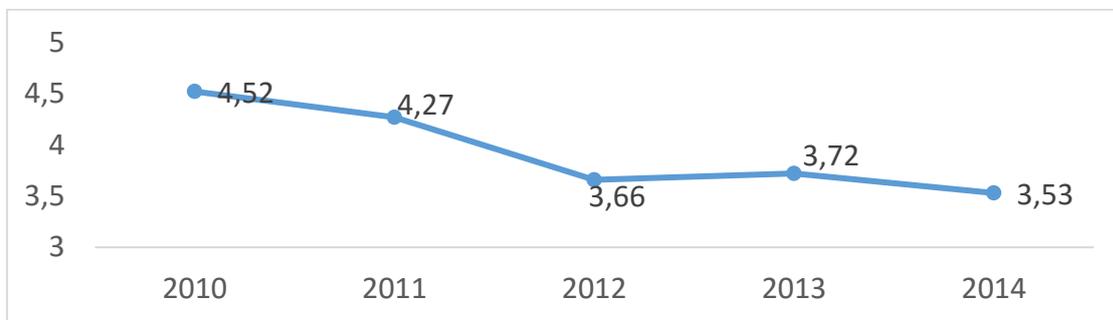
Kota Dumai merupakan daerah otonom yang berada pada wilayah pesisir Provinsi Riau. Pada tahap ke-3 pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai pada misi 1 yaitu mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhan dan industri. Menurut Rostow bahwa untuk menuju tahap tinggal landas paling tidak dibutuhkan

pertambahan investasi antara 5 sampai dengan 10 persen terhadap produk domestik bruto. Kota Dumai dalam mengembangkan daya saing dan bertumpu pada kepelabuhan dan industri, maka dibutuhkan pemupukan kapital yang cukup. Konsentrasi kegiatan ekonomi yang tertuju pada wilayah tertentu, dikhawatirkan dapat meningkatkan ketimpangan pembangunan antar wilayah.

Perekonomian Kota Dumai pada tahun 2010 mampu menghasilkan nilai produksi barang dan jasa yang tercermin dalam PDRB harga konstan 2010 sebesar Rp. 17.495.472,60 juta atau tumbuh sebesar 4,55%. Selanjutnya pada tahun 2011 perekonomian Kota Dumai mengalami pertumbuhan yang relatif melambat yaitu sebesar 4,27% sehingga PDRB atas dasar harga konstan hanya meningkat menjadi Rp. 18. 242.262,80 juta.

Pertumbuhan ekonomi Kota

Dumai pada tahun 2012 lebih melambat lagi dan hanya tumbuh sebesar 3,66% atau PDRB Kota Dumai meningkat menjadi sebesar Rp. 18.909,70 juta. Ditahun 2013 perekonomian Kota Dumai tumbuh lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu 3,72% namun kinerja ekonomi ini tidak bertahan, dimana pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Kota Dumai kembali terkoreksi sehingga hanya mampu tumbuh sebesar 3,53%. Dengan demikian PDRB Kota Dumai pada tahun menjadi sebesar Rp. 20.306.306,00 juta.

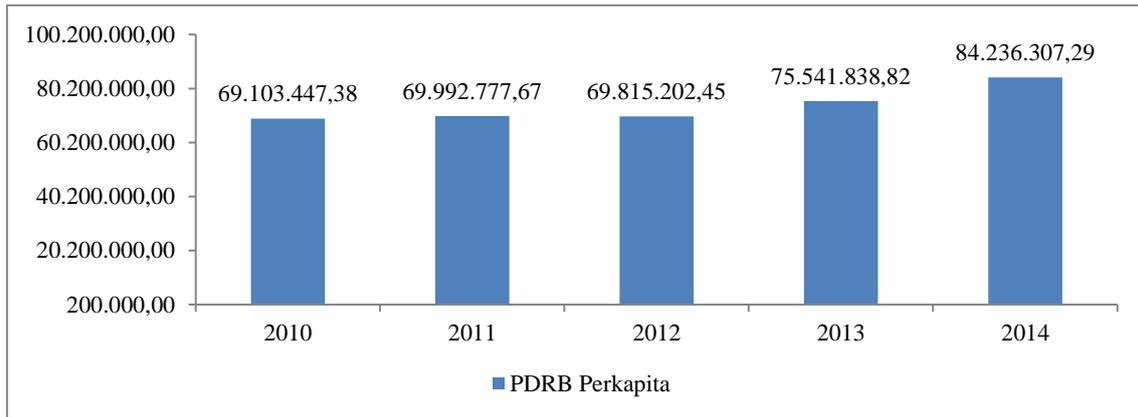


Gambar 1 :

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Dumai Tahun 2010-2014 (Sumber : BPS 2015)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita Kota Dumai pada tahun 2010 telah mencapai Rp. 69,10 juta dan meningkat menjadi Rp. 69,99 juta pada tahun 2011. Namun demikian, pada tahun 2012 PDRB perkapita Kota Dumai mengalami penurunan menjadi Rp. 69,82 juta. Kesejahteraan penduduk Kota Dumai pada tahun 2013 relatif membaik dibandingkan dengan kondisi tahun 2012, dimana PDRB perkapita meningkat menjadi Rp. 75,54 juta. Demikian juga ditahun 2014 PDRB perkapita Kota Dumai mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 84,24 juta. Ini berarti selama periode 2010 sampai dengan tahun 2014 rata-rata tingkat kesejahteraan penduduk Kota Dumai setiap tahunnya tumbuh sebesar 5,08%.

Pembangunan ekonomi yang berhasil bukan hanya sekedar bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Namun lebih dari itu, bahwa pertumbuhan ekonomi yang telah tercapai juga harus mampu dinikmati oleh setiap masyarakat dan setiap wilayah secara adil dan merata. Pertumbuhan ekonomi cenderung terkonsentrasi pada suatu wilayah dan setiap wilayah memiliki kemampuan yang berbeda dalam menghasilkan pertumbuhannya. Ini menunjukkan bahwa walaupun rata-rata ekonomi Kota Dumai selama periode 2010-2014 tumbuh sebesar 3,79% namun kemampuan pertumbuhan setiap wilayah kecamatan akan berbeda-beda.



Gambar 2 :
PDRB Perkapita Kota Dumai Tahun 2010 – 2014 (Sumber : BPS, 2015)

Aktivitas perekonomian yang terkonsentrasi di daerah perkotaan mendorong masyarakat pedesaan melakukan migrasi yang dapat mendorong terjadinya ketimpangan yang tinggi (Alkhudri, 2011). Selanjutnya menurut Bandiyono (2006), selama ada ketimpangan antara kota dengan pedesaan maka fenomena mengalirnya penduduk pedesaan menuju daerah perkotaan tentunya tidak dapat dicegah. Penelitian Taryono dan Ekwarto (2012) memperlihatkan bahwa indeks gini ratio yang menunjukkan ketimpangan antara kelompok masyarakat di Kota Dumai tahun 2008 sebesar 0,3819 dan menjadi sebesar 0,3335 pada tahun 2009. Angka masih masuk dalam kategori ketimpangan sedang.

Pemerataan telah menjadi isu penting dalam pelaksanaan pembangunan guna mengatasi melebarnya ketimpangan baik antar penduduk maupun antar wilayah, karena pembangunan tidak hanya bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi semata, namun juga untuk menyejahterakan masyarakat yang termarjinalkan. Dalam hal itu, perlindungan sosial akan terus ditingkatkan dan dioptimalkan. Hal ini bukan hanya ditujukan untuk memenuhi kewajiban konstitusional, namun juga dilandasi pertimbangan

untuk meningkatkan kualitas menuju SDM yang produktif, terdidik, terampil dan sehat, karena sumber daya manusia yang berkualitas merupakan pelaku sekaligus *key enabler* dalam proses pembangunan. (Bappenas, 2014).

Publikasi PDRB yang dikeluarkan oleh BPS sampai dengan tingkat kabupaten/kota menjadikan tingkat ketimpangan antar wilayah pada umumnya hanya dapat diukur pada ketimpangan antar kabupaten/kota. Sedangkan untuk mengukur tingkat ketimpangan dalam ruang lingkup yang lebih kecil lagi pada umumnya data PDRB perkapita menurut kecamatan belum tersedia. Sementara itu, meningkatnya kebutuhan data untuk perencanaan pembangunan daerah mengamanatkan perlunya indikator ketimpangan antar wilayah antar kecamatan dalam suatu wilayah kabupaten/kota. Maka, menjadi penting untuk dilakukan penelitian yang dapat memberikan pendekatan untuk menghitung ketimpangan pembangunan antar wilayah kecamatan di suatu kabupaten/kota.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kesejahteraan Penduduk

Pembangunan ekonomi diartikan sebagai serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonominya sehingga infrastruktur lebih banyak tersedia, dan perusahaan semakin banyak. Pembangunan ekonomi pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, oleh karenanya diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata, (Barika, 2012). Lebih lanjut Nurhuda, dkk, (2013) menyebutkan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata. Pertumbuhan ekonomi yang cepat dan tidak diimbangi dengan pemerataan, akan menimbulkan ketimpangan wilayah.

Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya dan kebutuhan pengembangannya. Keluarga pra sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, sandang, papan dan kesehatan. (Rahayu, 2010).

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB Perkapita. (BPS Bengkalis, 2015). Selanjutnya menurut Kuncoro (2004), pendapatan per kapita dipengaruhi oleh PDRB dan jumlah penduduk, dengan kata lain pendapatan per kapita mencerminkan pendapatan rata-rata yang diperoleh di suatu daerah, sehingga jika pendapatan tersebut besar masyarakat pun cenderung memiliki pengeluaran yang lebih besar untuk kebutuhannya, sehingga dapat memenuhi kebutuhannya.

Pendapatan perkapita merupakan salah satu indikator yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah dalam periode tertentu biasanya satu tahun, yang ditunjukkan dengan PDRB, baik atas harga berlaku maupun berdasarkan harga konstan. Pendapatan perkapita menunjukkan kemampuan masyarakat untuk membayar pengeluarannya termasuk membayar pajak. Semakin besar tingkat pendapatan perkapita masyarakat mempunyai pengaruh positif dalam meningkatkan penerimaan pajak. (Ladjin N, 2008). Menurut Sirojuzilam (2009), dalam suatu perekonomian apabila pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah akan meningkat, terutama pengeluaran pemerintah untuk mengatur hubungan dalam masyarakat seperti: hukum, pendidikan, kebudayaan dan sebagainya.

B. Ketimpangan Wilayah

Menurut Wahyudi (2004) dalam kehidupan ekonomi, ketimpangan dilaporkan terus membengkak, baik dalam negara (within states) maupun antar negara (between states). Seperti yang ditunjukkan oleh laporan UNDP tahun 1999, ketimpangan domestik telah meningkat di banyak negara seperti Cina, negara-negara Eropa Timur dan Negara Persemakmuran Merdeka dan juga di negara-negara industri maju seperti Swedia, Inggris dan Amerika Serikat, sementara ketimpangan antar negara juga meningkat dari waktu ke waktu.

Tujuan pembangunan ekonomi tidak hanya sekedar mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja melainkan juga harus berkualitas. Dengan demikian, sasaran dan target-target pembangunan menjadi tidak hanya sekedar untuk peningkatan pendapatan, melainkan juga harus mampu untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat. Beberapa

faktor pendorong utama pemacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas antara lain investasi human capital yang cukup dan berkelanjutan serta penguasaan penggunaan teknologi. Selain itu, harus ada kesinergian antara peran dan potensi modal sosial yang dimiliki. Dampak dari pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah diperoleh hasil pembangunan ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan seluruh masyarakat, adanya transformasi dari masyarakat yang terbelenggu dalam keterbelakangan (vicious circle) menjadi mampu menuju masyarakat yang "lebih maju". (Prasetyo, 2008).

Dalam upaya mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah di era otonomi daerah antara lain adalah melalui transmisi dana perimbangan yang terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil. Menurut Mujib dan Halim (2009), dana tersebut dialokasikan untuk mengurangi ketimpangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selanjutnya Prasetya, (2011) menyarankan untuk meminimalisir ketimpangan tersebut, kebijakan fiskal dapat digunakan melalui pengalokasian prioritas-prioritas pengeluaran pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ukuran ketimpangan pendapatan yang lebih penting untuk menganalisis seberapa besar kesenjangan antar wilayah/daerah adalah dengan melalui perhitungan indeks Williamson. (Sasana, 2009).

III. METODE PENELITIAN

A. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Dumai yang meliputi seluruh wilayah kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Bukit Kapur, Medang Kampai, Sungai Sembilan, Dumai Barat, dan Dumai Timur.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari lembaga/instansi yang mempublikasikan data dan informasi yang terkait dengan penelitian ini. Adapun data yang dibutuhkan antara lain : Data PDRB Kota Dumai, Data Penduduk Kota Dumai, Data penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha per kecamatan, Data lainnya sesuai dengan kebutuhan analisis ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menghubungi langsung lembaga/instansi yang mempublikasikan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, misalnya Badan Pusat Statistik (BPS) atau dengan mengunjungi laman-laman resmi situs lembaga/badan yang menyediakan data secara online melalui internet. Setelah diperoleh data selanjutnya dilakukan verifikasi, dikompilasi sesuai dengan variabel yang analisis.

D. Teknik Analisis Data

Analisis terkait dengan tujuan penelitian pertama yaitu untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat antar kecamatan di Kota Dumai yang tercermin dari PDRB Perkapita kecamatan, maka terlebih dahulu perlu dilakukan devifasi terhadap PDRB Kota Dumai menjadi PDRB pada setiap kecamatan. Dalam menghitung PDRB pada setiap kecamatan dibutuhkan data penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha. Penggunaan indikator ini mengasumsikan bahwa proporsi PDRB pada setiap kecamatan sebanding dengan persentase penggunaan penduduk yang bekerja pada setiap lapangan usaha di kecamatan. Langkah-langkah untuk menghitung PDRB perkecamatan adalah sebagai berikut :

Tentukan nilai proporsi penduduk yang bekerja menurut kecamatan dan lapangan usaha. Kalikan nilai proporsi

penduduk yang bekerja menurut kecamatan pada setiap lapangan usaha dengan nilai PDRB sesuai dengan lapangan usahanya. Formulasi untuk

menghitung besarnya PDRB sektor i di tingkat kecamatan adalah sebagai berikut :

$$PDRB_{Sektor\ i\ kec} = PDRB_{Sektor\ i\ kota} \times \%Penduduk\ Bekerja\ Sektor\ i\ kec$$

Jumlahkan PDRB seluruh lapangan usaha di Kecamatan, maka akan diperoleh PDRB kecamatan. PDRB

perkapita kecamatan diperoleh dengan formulasi

$$PDRB_{Per\ kapita} = \frac{PDRB_{Kecamatan}}{Jumlah\ Penduduk\ Kecamatan}$$

Setelah diperoleh perhitungan data PDRB perkapita perkecamatan, maka analisis terhadap tujuan penelitian kedua yaitu mengetahui tingkat ketimpangan

antar wilayah kecamatan di Kota Dumai dapat dihitung dengan menggunakan formulasi Indeks Williamson sebagai berikut :

$$Indeks\ Williamson = \frac{\sqrt{(Y_i - Y) \cdot f_i/n}}{Y}$$

Dimana : Y_i = PDRB Perkapita Kecamatan i

Y = PDRB Perkapita rata-rata seluruh kecamatan

f_i = Penduduk Kecamatan i

n = Jumlah seluruh penduduk kabupaten/kota

IV. HASIL PENELITIAN

A. Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai

Tujuan pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan penduduk. Dari segi ekonomi tingkat kesejahteraan penduduk suatu wilayah dapat diukur dari tingkat pendapatan perkapitanya. Banyaknya nilai barang dan jasa yang dihasilkan di tahun tertentu pada suatu wilayah dibagi dengan jumlah penduduk akan menggambarkan nilai dari pendapatan perkapita. Oleh karena itu, supaya kesejahteraan penduduk terus mengalami peningkatan, maka penambahan nilai barang dan jasa yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi suatu wilayah harus diupayakan selalu

lebih tinggi dari pertumbuhan penduduknya.

Penduduk merupakan faktor produksi, terutama bagi penduduk berada pada usia kerja (15 tahun keatas) . Pada penduduk usia tersebut mereka dianggap mampu untuk menghasilkan barang dan jasa. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 jumlah penduduk yang berkerja di Kota Dumai sebanyak 88.301 orang. Jumlah tersebut tersebar pada lima kecamatan yaitu Bukit Kapur sebanyak 13.312 orang, Medang Kampai sebanyak 3.868 orang, Sungai Sembilan sebanyak 9.543 orang, Dumai Barat 31.713 orang, dan Dumai Timur sebanyak 29.865 orang. Sebagian besar penduduk bekerja pada lapangan usaha jasa, perdagangan, dan pertanian.

Tabel 1 : Penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha dan Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2010

No	Lapangan Usaha	Kecamatan					Kota Dumai
		Bukit Kapur	Medang Kampai	Sungai Sembilan	Dumai Barat	Dumai Timur	
A	Pertanian	5.012	1.574	6.030	2.545	738	15.899
B	Pertambangan dan Penggalian	140	0	8	283	290	721
C	Industri Pengolahan	1.094	396	687	3.318	2.634	8.129
D.E	Listrik dan Gas	52	13	2	236	219	522
F.L	Konstruksi/Bangunan	644	243	353	3.467	2.638	7.345
G	Perdagangan	1.524	313	971	5.937	7.708	16.453
I	Hotel dan Rumah Makan	425	107	87	1.178	1.363	3.160
H	Transportasi dan Pergudangan	1.747	48	260	2.671	3.226	7.952
J	Informasi dan Komunikasi	47	5	21	394	277	744
K	Keuangan dan Asuransi	35	10	15	640	500	1.200
P	Jasa Pendidikan	548	159	345	2.313	1.788	5.153
Q	Jasa Kesehatan dan Jasa Kemasyarakatan	1.872	938	702	8.414	8.247	20.173
M.N.O. R.S.T.U	Lainnya	172	62	62	317	237	850
Jumlah		13.312	3.868	9.543	31.713	29.865	88.301

Sumber : BPS, Sensus Penduduk 2010

Pada umumnya penduduk di Kota Dumai Bekerja di lapangan usaha jasa kemasyarakatan yang mencapai sebanyak 20.173 orang atau 21,06%. Sektor lainnya yang banyak membuka kesempatan kerja adalah sektor perdagangan sebanyak 16.453 orang atau 18,63%, dan sektor pertanian sebanyak 15.899 orang atau 18,01%. Kota Dumai yang lebih dikenal sebagai kota pelabuhan, peranan lapangan usaha transportasi dan pergudangan di daerah ini dalam menyediakan lapangan kerja mencapai sebanyak 7.952 orang atau 9,01%. Selain berkembang kegiatan ekspor impor melalui pelabuhan, daerah ini juga mulai berkembang kegiatan industri pengolahan, dimana sektor ini mampu menyediakan kesempatan kerja sebanyak 8.129 orang atau 9,21%.

Pada Kecamatan Bukit Kapur, Medang Kampai dan Sungai Sembilan pada umumnya penduduknya bekerja di lapangan usaha pertanian. Sedangkan

pada Kecamatan Dumai Barat dan Dumai Timur pada umumnya penduduknya bekerja pada lapangan usaha perdagangan, jasa kemasyarakatan dan industri pengolahan. Penduduk Kecamatan Bukit Kapur yang bekerja di lapangan usaha pertanian sebanyak 5.012 orang atau 37,65%, Kecamatan Medang Kampai sebanyak 1.574 orang atau 40,69%, Kecamatan Sungai Sembilan sebanyak 6.030 orang atau 63,19%. Perkembangan perusahaan industri dan pelabuhan yang banyak berdiri di Kecamatan Dumai Barat dan Dumai Timur telah membuka kesempatan kerja terutama bagi penduduk di daerah ini. Di Dumai barat lapangan usaha industri pengolahan mampu menyediakan kesempatan kerja sebanyak 3.318 orang dan di Kecamatan Dumai Timur mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 2.634 orang.

Dalam menghitung perkiraan PDRB pada setiap kecamatan, pada

penelitian ini dibutuhkan data penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha. Penggunaan indikator ini mengasumsikan bahwa proporsi PDRB pada setiap kecamatan sebanding dengan persentase penggunaan penduduk yang bekerja pada setiap lapangan usaha di kecamatan. Data yang digunakan disini merupakan data sensus penduduk kota Dumai tahun 2010. Kemudian jumlah kecamatan diasumsikan masih 5 (lima) kecamatan yaitu Bukit Kapur, Medang Kampai, Sungai Sembilan, Dumai Barat dan Dumai Timur.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa Kecamatan Dumai Barat merupakan wilayah dengan jumlah PDRB kecamatan tertinggi di Kota Dumai yaitu Rp. 6.849,20 milyar. Sedangkan wilayah dengan nilai PDRB terendah adalah Kecamatan Medang Kampai yaitu Rp. 741,08 milyar.

Nilai Produk Domestik Regional yang besar tidak selalu mencerminkan bahwa kemakmuran penduduknya selalu lebih baik dari wilayah lainnya. Tingkat kemakmuran umumnya diukur dengan pendapatan perkapita yang menunjukkan ratio antara PDRB dengan jumlah penduduk. Pada tahun 2010 dengan jumlah penduduk Kecamatan Dumai Barat sebanyak 89.978 orang diperkirakan pendapatan perkapita penduduknya sebesar Rp. 76,12 juta. Walaupun PDRB Kecamatan Medang Kampai relatif lebih rendah dibandingkan dengan kecamatan lainnya, namun dengan jumlah penduduk yang lebih rendah menjadikan pendapatan perkapita penduduk di wilayah ini relatif lebih tinggi yaitu Rp. 72,66 juta.

Tabel 2 : PDRB Menurut Kecamatan di Kota Dumai Atas Dasar Harga Konstan 2010, Penduduk, dan PDRB Perkapita Tahun 2010 (Juta Rupiah)

No	Lapangan Usaha	Nama Kecamatan					Kota Dumai
		Bukit Kapur	Medang Kampai	Sungai Sembilan	Dumai Barat	Dumai Timur	
A	Pertanian	350.188,75	109.975,48	421.316,47	177.819,31	51.564,11	1.110.864,10
B	Pertambangan dan Penggalian	16.530,60	0,00	944,61	33.415,43	34.241,96	85.132,60
C	Industri Pengolahan	1.241.814,67	449.505,13	779.823,29	3.766.308,13	2.989.890,18	9.227.341,40
D.E	Listrik dan Gas	1.230,31	307,58	47,32	5.583,71	5.181,49	12.350,40
F.L	Konstruksi/ Bangunan	187.841,08	70.877,92	102.962,58	1.011.250,03	769.448,39	2.142.380,00
G	Perdagangan	314.274,11	64.545,80	200.236,32	1.224.307,98	1.589.517,59	3.392.881,80
I	Hotel dan Rumah Makan	13.320,59	3.353,65	2.726,80	36.921,54	42.719,91	99.042,50
H	Transportasi & Pergudangan	94.279,80	2.590,40	14.031,34	144.145,02	174.096,53	429.143,10
J	Informasi dan Komunikasi	8.022,98	853,51	3.584,74	67.256,49	47.284,38	127.002,10
K	Keuangan dan Asuransi	9.417,98	2.690,85	4.036,28	172.214,56	134.542,63	322.902,30
P	Jasa Pendidikan	7.215,96	2.093,68	4.542,89	30.457,13	23.544,04	67.853,70
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.189,36	1.097,02	821,01	9.840,41	9.645,10	23.592,90
M.N.O. R.S.T.U	Lainnya	92.067,69	33.187,19	33.187,19	169.682,90	126.860,72	454.985,70
Jumlah		2.338.393,88	741.078,21	1.568.260,84	6.849.202,64	5.998.537,03	17.495.472,60
Penduduk *		38.051	10.199	27.465	89.978	88.110	253.803
PDRB Perkapita (Juta)		61,454	72,662	57,100	76,121	68,080	68,933

Sumber : Data Diolah

Sebagai kecamatan dengan luas wilayah terluas pada tahun 2011 PDRB Kecamatan Sungai Sembilan diperkirakan sebesar Rp. 1.633,50 milyar. Kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB adalah sektor industri pengolahan yaitu Rp. 825,83 milyar. Kontribusi terendah terhadap pembentuk PDRB di Kecamatan Sungai Sembilan diperkirakan bersumber dari sektor listrik dan gas yaitu Rp. 50,48 juta.

Kawasan industri pada umumnya berkembang disepanjang pantai di Kota Dumai. Wilayah kecamatan yang berada pada kawasan ini antara lain Kecamatan Medang Kampai, Dumai Barat dan Dumai Timur. Pada tahun 2011 Kontribusi sektor industri pengolahan di Kecamatan Medang Kampai diperkirakan sebesar Rp. 476,03 milyar. Kontribusi sektor industri pengolahan di

Kecamatan Dumai Barat diperkirakan sebesar Rp. 3.988,53 milyar. Sedangkan kontribusi sektor industri pengolahan di Kecamatan Dumai Timur diperkirakan sebesar Rp. 3.166,30 milyar. Berkembang-nya kegiatan industri belum sepenuhnya ditopang oleh berkembangnya sektor listrik dan gas, dimana pada tahun 2011 pembentukan sektor listrik dan gas baru mencapai sebesar Rp. 13,18 milyar.

Pada tahun 2011 PDRB Kecamatan Bukit Kapur diperkirakan sebesar Rp. 2.442,51 milyar. Kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB adalah sektor industri pengolahan yaitu Rp. 1.315,08 milyar. Kontribusi terendah terhadap pembentuk PDRB di Kecamatan Bukit Kapur diperkirakan bersumber dari sektor listrik dan gas yaitu Rp. 16,61 milyar.

Tabel 3 : PDRB Menurut Kecamatan di Kota Dumai Atas Dasar Harga Konstan 2010, Penduduk, dan PDRB Perkapita Tahun 2011

No	Lapangan Usaha	Kecamatan					Kota Dumai
		Bukit Kapur	Medang Kampai	Sungai Sembilan	Dumai Barat	Dumai Timur	
A	Pertanian	356.952,60	112.099,64	429.454,14	181.253,86	52.560,06	1.132.320,30
B	Pertambangan dan Penggalian	16.611,59	0,00	949,23	33.579,15	34.409,73	85.549,70
C	Industri Pengolahan	1.315.084,12	476.026,79	825.834,36	3.988.527,51	3.166.299,42	9.771.772,20
D.E	Listrik dan Gas	1.312,45	328,11	50,48	5.956,51	5.527,44	13.175,00
F.L	Konstruksi Bangunan	186.140,54	70.236,26	102.030,45	1.002.095,12	762.482,53	2.122.984,90
G	Perdagangan	328.261,72	67.418,58	209.148,38	1.278.799,09	1.660.263,33	3.543.891,10
I	Hotel dan Rumah Makan	14.523,54	3.656,52	2.973,05	40.255,84	46.577,85	107.986,80
H	Transportasi dan Pergudangan	99.655,80	2.738,11	14.831,43	152.364,43	184.023,83	453.613,60
J	Informasi dan Komunikasi	9.139,39	972,28	4.083,56	76.615,31	53.864,06	144.674,60
K	Keuangan dan Asuransi	8.521,47	2.434,71	3.652,06	155.821,12	121.735,25	292.164,60
p	Jasa Pendidikan	7.970,60	2.312,64	5.017,99	33.642,32	26.006,26	74.949,80
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.267,06	1.135,95	850,15	10.189,64	9.987,40	24.430,20
M.N.O. R.S.T.U	Lainnya	96.067,06	34.628,82	34.628,82	177.053,82	132.371,47	474.750,00
Jumlah		2.442.507,93	773.988,40	1.633.504,10	7.136.153,74	6.256.108,63	18.242.262,80
Penduduk		39.424	10.583	28.529	93.447	90.993	262.976
PDRB Perkapita (Juta)		61,955	73,135	57,258	76,366	68,754	69,369

Sumber : Data Olahan

Ekonomi Kota Dumai pada tahun 2012 tumbuh sebesar 3,66%. Dilihat menurut wilayah, Kecamatan Dumai Barat dan Dumai Timur merupakan wilayah yang memegang peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Dumai. Pada tahun 2012 kontribusi Kecamatan Dumai Barat terhadap PDRB Kota Dumai diperkirakan sebesar 39,24% dan Kontribusi Kecamatan Dumai Timur diperkirakan sebesar 34,41%. Pada tahun 2012 diperkirakan Laju pertumbuhan ekonomi Kecamatan Dumai Barat sebesar 3,98% dan Kecamatan Dumai Timur sebesar 4,02%.

Kegiatan ekonomi wilayah Kota Dumai untuk sektor sekunder dan tersier

terkonsentrasi pada Kecamatan Dumai Barat dan Dumai Timur. Industri Pengolahan banyak berkembang di Kecamatan Dumai Barat dan Dumai Timur. Listrik dan Gas banyak berkembang di Dumai Barat dan Dumai Timur. Kontruksi dan bangunan banyak berkembang di Kecamatan Dumai Barat dan Dumai Timur. Sektor Perdagangan banyak berkembang di Kecamatan Dumai Barat dan Dumai Timur. Demikian juga untuk sektor hotel dan rumah makan, transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi dan lainnya banyak berkembang di Kecamatan Dumai Timur dan Dumai Barat. Sedangkan sektor pertanian banyak berkembang di Kecamatan Bukit Kapur.

Tabel 4 : PDRB Menurut Kecamatan di Kota Dumai Atas Dasar Harga Konstan 2010, Penduduk, dan PDRB Perkapita Tahun 2012

No	Lapangan Usaha	Kecamatan					Kota Dumai
		Bukit Kapur	Medang Kampai	Sungai Sembilan	Dumai Barat	Dumai Timur	
A	Pertanian	356.731,74	112.030,28	429.188,43	181.141,72	52.527,54	1.131.619,70
B	Pertambangan dan Penggalian	16.779,84	0,00	958,85	33.919,26	34.758,25	86.416,20
C	Industri Pengolahan	1.350.573,47	488.873,03	848.120,63	4.096.163,41	3.251.746,36	10.035.476,90
D.E	Listrik dan Gas	1.381,00	345,25	53,12	6.267,61	5.816,13	13.863,10
F.L	Konstruksi/Bangunan	192.933,68	72.799,51	105.754,02	1.038.666,23	790.309,06	2.200.462,50
G	Perdagangan	338.362,48	69.493,08	215.583,97	1.318.148,31	1.711.350,37	3.652.938,20
I	Hotel dan Rumah Makan	16.585,65	4.175,68	3.395,18	45.971,52	53.191,16	123.319,20
H	Transportasi dan Pergudangan	110.558,19	3.037,66	16.453,99	169.033,15	204.156,10	503.239,10
J	Informasi dan Komunikasi	10.773,81	1.146,15	4.813,83	90.316,61	63.496,70	170.547,10
K	Keuangan dan Asuransi	11.607,15	3.316,33	4.974,49	212.245,01	165.816,42	397.959,40
P	Jasa Pendidikan	8.317,38	2.413,25	5.236,31	35.106,03	27.137,73	78.210,70
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.462,02	1.233,64	923,26	11.065,96	10.846,32	26.531,20
M.N.O. R.S.T.U	Lainnya	99.003,69	35.687,38	35.687,38	182.466,10	136.417,87	489.262,40
	Jumlah	2.516.070,09	794.551,24	1.671.143,45	7.420.510,91	6.507.570,02	18.909.845,70
	Penduduk	42.082	10.983	29.920	87.623	100.915	271.523
	PDRB Perkapita (Juta)	59,790	72,344	55,854	84,687	64,486	69,644

Sumber : Data Olahan

Pada tahun 2013 PDRB Kota Dumai atas dasar harga konstan 2010 meningkat menjadi sebesar Rp. 19.613,95 milyar. Dilihat dari kontribusi wilayah kecamatan, PDRB terbesar diperkirakan berasal dari Kecamatan Dumai Barat sebesar Rp. 7.721,34 milyar dan terendah adalah Kecamatan Medang Kampai sebesar Rp. 818,69 milyar. Sedangkan kontribusi kecamatan lainnya seperti Kecamatan Dumai Timur sebesar Rp. 6.766,48 milyar, Kecamatan Bukit Kapur sebesar 2.596,17 milyar, dan Kecamatan Sungai Sembilan Sebesar 1.711,27 milyar.

Sektor industri pengolahan masih memegang peranan penting dalam perekonomian Kota Dumai. Pada tahun 2013 kontribusi sektor industri

pengolahan mencapai sebesar Rp. 10.408,62 milyar. Berkembangnya sektor industri pengolahan diikuti oleh berkembangnya sektor perdagangan, dimana kontribusinya mencapai sebesar Rp. 3.723,62 milyar. Perkembangan kedua sektor ini sangat membutuhkan energi yang cukup besar, sedangkan kontribusi sektor listrik dan gas baru mencapai sebesar Rp. 13,99 milyar. Kecamatan Dumai Barat dan Kecamatan Dumai Timur merupakan sebagai wilayah konsentrasi berkembangnya kegiatan industri pengolahan. Pada tahun 2013 nilai PDRB dari sektor industri pengolahan di Kecamatan Dumai Barat sebesar Rp. 4.248,88 milyar dan di Kecamatan Dumai Timur sebesar Rp. 3.372,98 milyar.

Tabel 5 : PDRB Menurut Kecamatan di Kota Dumai Atas Dasar Harga Konstan 2010, Penduduk, dan PDRB Perkapita Tahun 2013

No	Lapangan Usaha	Nama Kecamatan					Kota Dumai
		Bukit Kapur	Medang Kampai	Sungai Sembilan	Dumai Barat	Dumai Timur	
A	Pertanian	353.011,94	110.862,09	424.713,09	179.252,87	51.979,81	1.119.819,80
B	Pertambangan dan Penggalian	16.792,14	0,00	959,55	33.944,10	34.783,71	86.479,50
C	Industri Pengolahan	1.400.925,72	507.099,25	879.740,37	4.248.877,08	3.372.978,37	10.409.620,80
D.E	Listrik dan Gas	1.393,88	348,47	53,61	6.326,07	5.870,37	13.992,40
F.L	Konstruksi/Bangunan	198.890,36	75.047,14	109.019,10	1.070.734,31	814.709,29	2.268.400,20
G	Perdagangan	344.909,27	70.837,66	219.755,18	1.343.652,44	1.744.462,35	3.723.616,90
I	Hotel dan Rumah Makan	20.776,42	5.230,77	4.253,06	57.587,35	66.631,20	154.478,80
H	Transportasi dan Pergudangan	119.175,06	3.274,41	17.736,41	182.207,55	220.067,97	542.461,40
J	Informasi dan Komunikasi	13.021,91	1.385,31	5.818,30	109.162,41	76.746,16	206.134,10
K	Keuangan dan Asuransi	13.812,61	3.946,46	5.919,69	252.573,39	197.322,96	473.575,10
P	Jasa Pendidikan	8.775,68	2.546,23	5.524,83	37.040,41	28.633,05	82.520,20
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.658,68	1.332,18	997,00	11.949,86	11.712,68	28.650,40
M.N.O. R.S.T.U	Lainnya	102.025,81	36.776,74	36.776,74	188.035,93	140.582,07	504.197,30
	Jumlah	2.596.169,47	818.686,72	1.711.266,94	7.721.343,76	6.766.480,00	19.613.946,90
	Penduduk	45.933	11.235	32.065	79.883	110.911	280.027
	PDRB Perkapita (Juta)	56,521	72,869	53,369	96,658	61,008	70,043

Sumber : Data Olahan

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Dumai pada tahun 2014 sebesar 3,53%. Beberapa sektor ekonomi seperti bangunan, jasa keuangan dan asuransi bahkan pertumbuhannya negatif, masing-masing sebesar 7,80% dan 39,65%. Sehingga PDRB sektor bangunan Kota Dumai turun dari sebesar Rp. 2.181,41 milyar pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp. 2.011,31 milyar pada tahun 2014 dan PDRB sektor jasa keuangan dan asuransi turun dari sebesar Rp. 473,56 milyar pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp. 285,82 milyar pada tahun 2014.

Kecamatan Dumai Barat dan Dumai Timur masih diperkirakan merupakan wilayah penyumbang terbesar terhadap pembentukan PDRB Kota Dumai pada tahun 2014. Kontribusi

Kecamatan Dumai Barat terhadap PDRB Kota Dumai mencapai sebesar Rp. 7.956,65 milyar. Sedangkan kontribusi Kecamatan Dumai Timur terhadap PDRB Kota Dumai mencapai sebesar Rp. 6.990,05 milyar. Kontribusi PDRB terendah diperkirakan berasal dari Kecamatan Medang Kampai sebesar Rp. 855,82 milyar. Walaupun kecamatan Dumai Barat dan Dumai Timur merupakan wilayah yang memiliki kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB Kota Dumai namun pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi pada kedua kecamatan tersebut mulai melambat, dimana laju pertumbuhan ekonomi Kecamatan Dumai Barat sebesar 3,05% dan Kecamatan Dumai Timur sebesar 3,30%.

Tabel 6 : PDRB Menurut Kecamatan di Kota Dumai Atas Dasar Harga Konstan 2010, Penduduk, dan PDRB Perkapita Tahun 2014

No	Lapangan Usaha	Kecamatan					Kota Dumai
		Bukit Kapur	Medang Kampai	Sungai Sembilan	Dumai Barat	Dumai Timur	
A	Pertanian	358.781,34	112.673,95	431.654,32	182.182,46	52.829,33	1.138.121,40
B	Pertambangan dan Penggalian	16.943,42	0,00	968,20	34.249,91	35.097,08	87.258,60
C	Industri Pengolahan	1.504.449,08	544.572,06	944.750,02	4.562.853,80	3.622.229,33	11.178.854,30
D.E	Listrik dan Gas	1.496,21	374,05	57,55	6.790,47	6.301,33	15.019,60
F.L	Konstruksi/Bangunan	184.262,31	69.527,55	101.000,92	991.983,56	754.788,76	2.101.563,10
G	Perdagangan	357.196,62	73.361,25	227.583,93	1.391.519,89	1.806.608,61	3.856.270,30
I	Hotel dan Rumah Makan	24.040,03	6.052,43	4.921,14	66.633,31	77.097,79	178.744,70
H	Transportasi dan Pergudangan	132.035,85	3.627,77	19.650,44	201.870,50	243.816,63	601.001,20
J	Informasi dan Komunikasi	14.485,03	1.540,96	6.472,03	121.427,68	85.369,20	229.294,90
K	Keuangan dan Asuransi	8.336,41	2.381,83	3.572,75	152.437,17	119.091,54	285.819,70
P	Jasa Pendidikan	9.562,36	2.774,48	6.020,10	40.360,84	31.199,82	89.917,60
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.726,82	1.366,32	1.022,56	12.256,13	12.012,87	29.384,70
M.N.O. R.S.T.U	Lainnya	104.222,87	37.568,71	37.568,71	192.085,18	143.609,43	515.054,90
Jumlah		2.718.538,34	855.821,37	1.785.242,66	7.956.650,90	6.990.051,73	20.306.305,00
Penduduk		42.399	11.240	30.475	84.952	111.043	280.109
PDRB Perkapita (Juta)		64,118	76,141	58,581	93,661	62,949	72,494

Sumber : Data Olahan

Penduduk Kota Dumai pada tahun 2010 sebanyak 253.803 orang dan meningkat menjadi sebanyak 280.109

orang pada tahun 2014 atau rata-rata setiap tahun tumbuh sebesar 2,50%.

Tabel 7 : Jumlah Penduduk Kota Dumai Menurut Kecamatan Tahun 2010-2014

Kecamatan	2010	2011	2012	2013	2014
Bukit Kapur	38.051	39.424	42.082	45.933	42.399
Medang Kampai	10.199	10.583	10.983	11.235	11.240
Sungai Sembilan	27.465	28.529	29.920	32.065	30.475
Dumai Barat	89.978	93.447	87.623	79.883	84.952
Dumai Timur	88.110	90.993	100.915	110.911	111.043
Kota Dumai	253.803	262.976	271.523	280.027	280.109

Sumber : BPS, 2016

Perbandingan antara nilai PDRB dengan jumlah penduduk setiap kecamatan, maka diperoleh besarnya angka pendapatan perkapita untuk setiap

kecamatan. Kecamatan Dumai Barat dengan pendapatan perkapita tertinggi dan Kecamatan Sungai Sembilan dengan pendapatan perkapita terendah.

Tabel 8 : Pendapatan Perkapita Menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2010-2014 (Dalam Juta)

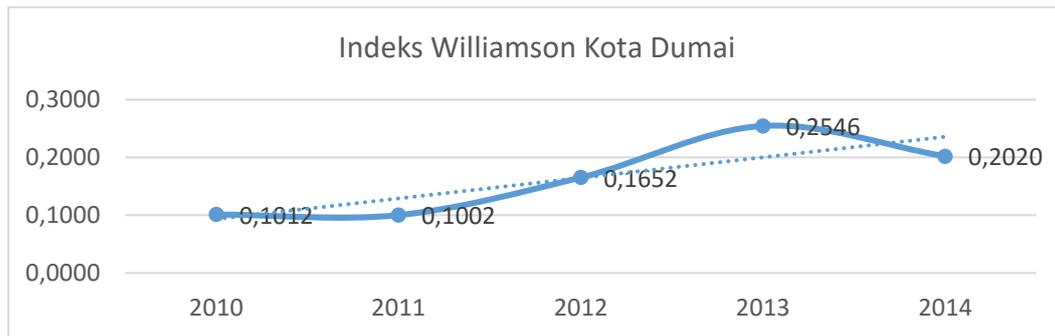
KECAMATAN	2010	2011	2012	2013	2014
Bukit Kapur	61,45	61,95	59,79	56,52	64,12
Medang Kampai	72,66	73,14	72,34	72,87	76,14
Sungai Sembilan	57,10	57,26	55,85	53,37	58,58
Dumai Barat	76,12	76,37	84,69	96,66	93,66
Dumai Timur	68,08	68,75	64,49	61,01	62,95
Rata-rata Kecamatan	67,08	67,49	67,43	68,09	71,09

Sumber : Data diolah.

B. Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Williamson Kota Dumai Tahun 2010-2014 menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan antar wilayah kecamatan di Kota Dumai dalam kategori rendah, namun demikian trendnya cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 tingkat ketimpangan antar wilayah di Kota Dumai yang tercermin dalam Indeks Williamson sebesar 0,1012 dan menjadi sebesar 0,1002 pada tahun 2011. Pada tahun 2012 meningkat menjadi

sebesar 0,1652 dan terus meningkat menjadi 0,2546 pada tahun 2013. Pada tahun 2014 tingkat ketimpangan antar wilayah di Kota Dumai sebesar 0,2020 relatif turun dibandingkan dengan tahun 2013.



Gambar 3 :

Perkembangan Indeks Williamson Kota Dumai Tahun 2010-2014

(Sumber : Diolah dari Sensus Penduduk 2010 dan PDRB Harga Konstan 2010)

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kecamatan dengan tingkat pendapatan perkapita tertinggi adalah Kecamatan Dumai Barat, dimana tahun 2010 sebesar 76,12 juta dan meningkat menjadi sebesar Rp. 93,66 juta ditahun 2014. Sedangkan kecamatan dengan pendapatan perkapita terendah adalah Kecamatan Sungai Sembilan, dimana pada tahun 2010 sebesar Rp. 57,10 juta dan meningkat menjadi sebesar Rp. 58,58 juta pada tahun 2014.
2. Tingkat ketimpangan antar wilayah kecamatan di Kota Dumai dalam kategori rendah, namun demikian trendnya cenderung meningkat. Pada tahun 2010 tingkat ketimpangan antar wilayah di Kota Dumai yang tercermin dalam Indeks Williamson sebesar 0,1012 dan menjadi sebesar 0,1002 pada tahun 2011. Pada tahun 2012 meningkat menjadi sebesar 0,1652 dan terus meningkat menjadi 0,2546 pada tahun 2013. Tingkat ketimpangan antar wilayah di Kota Dumai pada tahun 2014 relatif lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 0,2020.

B. Saran

1. Dalam upaya terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka produktivitas wilayah harus terus ditingkatkan dengan tetap menekan laju pertumbuhan penduduk pada tingkat yang seimbang sesuai dengan perkembangan ekonomi wilayah tersebut.
2. Trend ketimpangan yang cenderung meningkat harus diantisipasi dengan berbagai kebijakan dan program pembangunan yang mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah di Kota Dumai. Sehingga tidak menjadi bom waktu pada masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkhudri A.T, 2011. Mudik Sebagai Fenomena Kultural-Kependudukan. *Jurnal Sosialita* Volume 9 Nomor 1 Juni 2011. Hlm. 50-59.
- Bandiyono, S. 2006. *Relevansi Karya Penelitian Migrasi dalam Pembangunan. Pidato Pengukuhan Profesor Kependudukan*. Makalah disampaikan pada orasi ilmiah untuk pengukuhan professor riset bidang kependudukan, Widyagraha LIPI, 23 Maret 2006.
- Bappenas, 2014. *Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah : Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan*.
- Barika, 2012. *Analysis Of Regional Disparities Regencies/Cities In The Province Of Bengkulu Year 2005 – 2009*. *Jurnal Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan* volume : 04. No. 03, Januari - Juni 2012 ISSN: 1979-7338.
- BPS Bengkalis, 2015. *Pendapatan Regional Kabupaten Bengkalis Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2014*.
- Kuncoro. M, (2004). *Otonomi dan pembangunan daerah: Reformasi, perencanaan, strategi dan peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Mujib, I dan Abdullah Halim. 2009. *Problem Desentralisaasi dan Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat-Daerah Peluang dan Tantangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.
- Nurhuda, R, M. R. Khairul Muluk, Wima Yudo Prasetyo, 2013. *Analisis Ketimpangan Pembangunan (Studi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011)*. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, Nomor 4, Hlm. 110-119
- Prasetyia, F, 2011. *Rekonstruksi Sistem Fiskal Nasional Dalam Bingkai Konstitusi*. *Journal of Indonesian Applied Economics*. Vol. 5 No. 2 Oktober 2011, Hlm. 141-156
- Prasetyo, E.P., 2008. *The Quality Of Growth: Peran Teknologi Dan Investasi Human Capital Sebagai Pemacu Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas*. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan (JEJAK)*, Volume 1, Nomor 1, September 2008. Hlm. 18-31.
- Sasana, H. 2009. *Analisis Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan Antar Daerah Dan Tenaga Kerja Terserap Terhadap Kesejahteraan Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Dalam Era Desentralisasi Fiskal*. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Maret 2009, Hlm. 50 - 69 Vol. 16, No.1 ISSN: 1412-3126
- Taryono dan Ekwarso, H., 2012. *Analisis Pengeluaran Dan Distribusi Pendapatan Penduduk Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau Tahun 2008 dan 2009*. *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan Tahun II* No. 5, Maret 2012.
- Wahyudi, A. 2004. *Filsafat Politik Barat Dan Masalah Keadilan*. *Catatan Kritis Atas Pemikiran Will Kymlicka*. *Jurnal Filsafat*, April 2004, Jilid 36, Nomor 1.
- Rahayu, W. 2010. *Dampak Kenaikan Harga Beras Terhadap Konsumsi Keluarga Pra Sejahtera Di Kota Surakarta*. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*. Vol. VI/No.2 : 121-127.
- Ladjin N, 2008. *Tesis : Analisis Kemandirian Fiskal Di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Di Propinsi Sulawesi Tengah)*. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang

Sirojuzilam, 2009. Disparitas Ekonomi Regional Dan Perencanaan Wilayah. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ilmu Ekonomi Regional Pada Fakultas Ekonomi, Diucapkan Di Hadapan Rapat Terbuka Universitas Sumatera Utara. Medan.